Journal of Education Development & Technology Research
Vol. 2, No. 1 April (2026) · pp. xx–xx
p-ISSN 0000-0000 · e-ISSN 0000-0000
https://eduvantatechjournal.co.id

PUBLISHED BY
PT EDUCATION ADVANTAGE TECHNOLOGY

TEMPLATE KEY ■ Grey guidance text: you (the author) write here. ■ Tinted text: completed by the Desk Editorial. Do not edit it.
Add a co-author by copying a row of the author table (and of the CRediT table). Header, footer, licence, article history, certificate and editorial record are filled from OJS. This key and the style guide are removed before publication.

RESEARCH ARTICLE

OPEN ACCESS

IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN UNTUK MENINGKATAKAN MUTU PENDIDIKAN

1 **Yahya K. Abas** CORRESPONDING AUTHOR
Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pohuwato, Gorontalo, Indonesia
yahyakabas27@gmail.com

2 **Revalina Mohi** AUTHOR
Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pohuwato, Gorontalo, Indonesia

ARTICLE HISTORY
Received 16 Maret 2026
Revised 27 Maret 2026
Accepted 02 April 2026
Published 24 April 2026

KEYWORDS
Manajemen Pembiayaan, Mutu Pendidkan, Sekolah

DOI
https://doi.org/10.xxxxx/xxxxx

ARTICLE LINK
https://journal.example.org/article/view/xxx

ABSTRACT

Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga pada efektivitas manajemen pembiayaan yang diterapkan oleh lembaga pendidikan. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai upaya strategis telah dilakukan oleh pemerintah dan masyrakat selaku pengelola dan pemangku kepentingan pendidikan. Misalnya, yang dilakukan pemerintah adalah merancang standar nasional pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 terdapat 8 standar nasional yang bertujuan agar meningkatkan mutu pendidikan adalah standar pembiayaan. Pembiayaan pendidikan merupakan hal penting dan tidak terpisahkan dalam kegiatan pengelolaan pendidikan. Jadi, antara lain, kebijakan pemerintah adalah dengan mendistribusikan dana BOS di tingkat sekolah. Pembiayaan pendidikan dan pendanaan yang dikelola sekolah/madrasah harus transparan agat terciptanya akuntabilitas. Jika dapat dipertanggung jawabkan maka kredibilitas lembaga pendidikan tersebut juga akan meningkat. Jika kredibel maka dengan sendirinya akan meningkatkan kualitas institusi pendidikan.

© 20xx The Author(s). The authors retain copyright and grant Journal of Education Development & Technology Research the right of first publication. This is an open access article distributed under the terms of the **CC BY-NC-SA 4.0** license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), which permits non-commercial use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, provided the original work is properly cited and adaptations are shared under the same license.

1. Introduction

Masyarakat di Indonesia harus meningkatkan kemampuan serta kualitas yang ada pada dirinya agar dapat bersaing pada zaman sekarang ini yaitu dengan adanya pendidikan. Pendidikan ialah komponen penting yang perlu diajarkan bagi peserta didik untuk menjadikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Peserta didik perlu diperhatikan karena peserta didik merupakan generasi emas bangsa nantinya. Dengan adanya pendidikan maka seseorang dapat mengubah dirinya menjadi lebih baik lagi, berkualitas yang dimaksud adalah agar peserta didik dapat memiliki pengetahuan, sikap ataupun keterampilan agar dapat berkembang dengan perkembangan globalisasi yang selalu berubah seiring perkembangan zaman. Pendidikan penting diajarkan untuk anak-anak bangsa agar nanti kedepannya siap dan menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Perlu adanya perhatian bagi pihak sekolah terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Dikarenakan harapannya pengelolaan pendidikan di tengah masyarakat harus secara terus menerus secara berkelanjutan melakukan pembenahan dan melakukan berbagai inovasi agar dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kesemuanya ini dilakukan dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu dalam sebuah pengelolaan pendidikan baik pada pendidikan formal maupun non formal dengan berbagai jenis pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan universitas.Ketika kita membicarakan tentang upaya cara pencapaian peningkatan mutu dalam bidang pendidikan maka dapat menjadi sebuah topik yang tidak pernah habis-habisnya untuk dibahas, didiskusikan, dan bahkan diteliti. Sehingga pembahasan peningkatan mutu initetap menjadi sebuah isu yang aktual. Dalam peningkatan mutu sebuah lembaga pendidikan diperlukan berbagai macam upaya dan strategi agar dapat tercapai. Upaya dan strategi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan konsep peningkatan mutu pendidikan adalah dengann menerbitkannya peraturan dan perundang-undangan, diantaranya UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan betapa urgennya peningkatan mutu dalam sebuah instansi pendidikan. Terkait mutu pendidikan, akan berkaitan langsung dengan peran sekolah sebagai lembaga pendidikan. Pengelolaan belajar mengajar di sekolah sangat berarti dalam menentukan keberhasilan siswa. Dalam hal ini sekolah berperan penting dalam menjadikan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan serta memiliki nilai religius dan nilai sosial yang tinggi.

Dengan demikian sekolah adalah agen sosial yang harus diperhatikan dalam hal proses pembelajarannya. Mutu pendidikan adalah kualitas pendidikan yang mampu mengacu pada masukan, proses, keluaran, dan dampaknya (Sabban, 2022). Mutu pendidikan mengacu pada seberapa baik

sistem pendidikan atau lembaga pendidikan dapat memenuhi standar tertentu dalam menyediakan pendidikan yang efektif, relevan, dan bermakna bagi peserta didik. Konsep mutu pendidikan mencakup berbagai aspek, termasuk efektivitas proses pembelajaran, relevansi kurikulum dengan kebutuhan siswa dan masyarakat, ketersediaan sumber daya pendidikan, kesetaraan akses dan kesempatan, perkembangan keterampilan abad ke-21 prestasi akademik dan nonakademik siswa, serta kepuasan dan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan.

Pendidikan yang bermutu dilihat dari sisi input, proses, output maupun outcome (Papilaya, 2022)Input pendidikan yang bermutu adalah guru-guru yang bermutu, peserta didik yang bermutu, kurikulum yang bermutu, fasilitas yang bermutu, dan berbagai aspek penyelenggara pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan yang bermutu adalah proses pembelajaran yang bermutu. Output pendidikan bermutu adalah yang memiliki kompetensi yang disyaratkan. Dan outcome pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau terserap pada dunia usaha atau dunia industri.

Rendahnya mutu Indonesia, berdasarkan data badan pusat statistik angka putus sekolah pada tahun ajaran 2022/2023 angka putus sekolah tingkat SD mencapai 0,17%. Nilainya kemudian naik di tahun ajaran ini menjadi 0,19%. Adapun untuk jenjang SMP, angka putus sekolah mencapai 0,18% di tahun ajaran 2023/2024, naik dari 0,14% di tahun sebelumnya. (Kurniady et al., 2018). Apabila melihat data demikian maka angka putus sekolah tertinggi ada pada usia 16-18 tahun atau setara pada tingkat SMK sederajat. Sistem kendali mutu dan jaminan kualitas mutu pendidikan menjadi isu utama dalam kontek pendidikan saat ini. Mutu pendidikan tentunya juga tertuju salah satunya pada mutu lulusan dari pendidikan itu sendiri. Untuk dapat menghasilkan lulusan yang bermutu tentunya harus di dukung oleh sebuah proses yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, dan tentunya harus didukung oleh faktor-faktor penunjang proses pendidikan yang bermutu pula.

Adapun beberapa faktor yang sangat mempengaruhi rendahnya mutu pendidikan dimana yaitu sering bergantinya kurikulum, ketidakcocokan pengelolaan gedung, lingkungan yang kurang kondusif, serta masih adanya pembiayaan-pembiayaan yang di bebankan kepada peserta didik. Biaya dan mutu, merupakan variabel yang mempunyai keterkaitan secara langsung dalam menjalankan proses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik di jenjang pendidikan. Biaya pendidikan memberikan pengaruh yang positif melalui faktor kepemimpinan.

Agar mendukung pencapaian standar mutu didukung PP No. 19 2005 dan hal ini merupakan penjabaran dari UU No. 20 tahun 2003, Adanya delapan standar pendidkkan nasional, diantaranya 1)

standar proses, 2) standar isi, 3) standar kompetensi, 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, 8) standar penilaian pendidikan (Tilaar, 2008). Dapat dipahami, dalam upaya peningkatan mutu pendidikan pada berbagai lembaga pendidikan ada salah satu diantaranya yang wajib terpenuhi dalam sistem pendidikan nasional menurut UU yaitu standar pembiayaan dalam pendidikan. Standar ini dapat berbeda-beda tergantung pada negara, tingkat pendidikan dan jenis instansi pendidikan yang terlibat Saat ini, sumber pembiayaan yang diperoleh sekolah menengah kejuruan, berbeda-beda, ada yang murni dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan iuran dari masyarakat berupa SPP. Bagi sekolah yang menerima dana BOS, pada SMK per siswa pertahun adalah sebesar Rp. 1.400.000. Dana ini memiliki aturan buku yang tentunya oleh pemerintah guna mengatur alokasi dana yang dimiliki. Hal ini juga yang menuntut kepala sekolah selaku pengambil keputusan harus dapat melakukan fungsi manajemennya terhadap pembiayaan sekolah secara baik. Standar pembiayaan pendidikan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun (Mafazi & Ahmad, 2024).

Standar pembiayaan pendidikan merujuk pada berbagai metode dan sumber pendanaan yang digunakan untuk mendukukng kegiatan pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non-formal. Pembiayaan pendidikan mnejadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yang terdiri atas 5 macam yaitu : 1) biaya investasi satuan pendidikan, 2) biaya investasi penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan, 3) biaya operasi satuan pendidikan, 4) biaya operasi peneyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan, 5) bantuan biaya pendidikan dan peserta didik (Wahyudin, 2021). Kelima macam pembiayaan pendidikan inilah yang harus dikelola secara optimal agar terciptanya peningkatan mutu di lembaga pendidikan tersebut. Agar menghasilkan nilai hasil yang positif bagi peserta didik. Agar mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan harus di kelola dengan optimal oleh pihak sekolah. Oleh karena itu, tahapan pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan. Pada dasarnya tujuan pembiayaan pendidikan adalah terselenggaranya proses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik yang diharapkan. Pada setiap proses tahapan manajemen pembiayaan perhatian utamanya adalah pencapian visi dan misi sekolah. Tahapan manajemen pembiayaan pendidikan melalui tahapan perencanaan pembiayaan pendidikan, tahapan pelaksanaan pembiayaan dan dipraktekan sesuai dengan prosedurnya maka dapat terciptanya hasil positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar manajemen pembiayaan pendidikan dan implikasinya terhadap meningkatkan mutu pendidikan.

2. Methods

Metode penelitian yang di gunakan adalah kajian literatur / studi literatur / kajian pustaka. Penelitian kajian pustaka merupakan suatu uraian atau deskripsi mengenai literatur yang relevan dengan bidang atau perihal topik tertentu (Setyosari, 2016). Literature in expert inolves identifying and resarching sources that provide factual or prior information in expert opinion about yhe research question ; an important component of other research methods at any given period (George, 2020).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari buku dan laporan ilmiah primer atau asli yang terdapat di dalam artikel atau jurnal berkenaan dengan pembiayaan dan mutu. Data yang diperoleh di review dan disusun sesuai dengan relevansi terhadap topik penelitian, kemudian dituliskan kembali sehingga terkumpul menjadi sebuah konsep penelitian. Sehingga dapat memperoleh kesimpulan dari penelitian terdahulu untuk menjawab bagaimana peran pembiayaan pendidikan dan mutu pendidikan peserta didik di Sekolah Menengah Kejuruan.

3. Results

Keterkaitan antara pembiayaan pendidikan dan mutu pendidikan adalah hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi. Berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil analisis data penelitian pada mutu sekolah SMK menggambarkan hasil rata-rata sebesar 4,63 yang berada pada kategori sangat tinggi. Hal tersebut tergambar dari skor rata-rata dimensi Mutu Kurikulum sebesar 5.00. Mutu peserta didik sebesar 4.32, Mutu pendidik sebesar 4.70, Lingkungan kerja sebesar 4.84, disiplin sekolah sebesar 4.56, ketersediaan sumber belajar sebesar 4.56, partisipasi orang tua sebesar 4,72 dan satuan biaya sebesar 4.72 Skora rata-rata dimensi mutu kurikulum lebih tinggi dari pada dimensi lainnya (Kurniady et al., 2018). Sedangkan dimensi terendah adalah mutu peserta didik. Hal ini menggambarkan bahwa kecenderungan mutu kurikulum di SMK telah sesuai dengan kurikulum yang dibuat telah mengacu pada kurikulum pusat, serta kurikulum yang dikembangakan disekolah sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis korelasi, diperoleh nilai p value =0,000. Nilai P value tersebut kurang dari taraf signifikasi 0,05. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah “Diterima” karena signifikan. Berdasarkan perhitungan diperoleh korelasi antara manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah sebesar r = 0,766 Setelah melihat koefisien korelasi maka pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah menunjukkan hasil yang kuat. Maka dapat

disimpulkam dari hasil korelasi tersebut ada pengaruh yang baik mengenai manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah di sekolah menengah kejuruan.

4. Discussion

Pembiayaan pendidikan adalah merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesionalisme guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, buku pelajaran, alat tulis kantor, pendukung kegiatan ekstrakulikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan. (Solihin, 2019). Education financing is part of implementing quality education in educational institutions or academic units that program their institutions to become quality institutions (Maruhawa, 2023).

Secara umum ada lima prinsip panduan dalam manajemen pembiayaan, yaitu ; 1) Akuntabilitas (accountabillity); proses pengelolaan pembiayaan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum dari mana dana tersebut berasal dan bagaimana dana tersebut digunakan untuk pendidikan; 2). Transparan (transparancy); pihak yang berkepentingan harus dapat mengakses proses pengelolaan pembiayaan pendidikan yang harus dilakukan secara transparan. Laporan yang ada tentang pengelolaan dana pendidikan merupakan contoh dari penerapan gagasan ini; 3). Integritas (integrity); baik sistem yang dikembangkan maupun personilnya harus dapat dipercaya agar berhasil melaksanakan pengelolaan pembiayaan pendidikan; 4) Konsistensi (consistency); visi, misi dan tujuan lembaga pendidikan harus dipatuhi dalam cara pengelolaan dana sehingga harus dilakukan secara konsisten.Konsistensi tersebut tetap memperhatikan tuntutan masyarakat pendidikan serta dinamika dan kemajuan di bidang pendidikan; 5) Efektif dan Efisien; pengelolaan dana pendidikan harus terfokus pada hasil yang diharaokan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Indikator produktivitas lembaga pendidikan adalah prinsip ini.

Proses manajemen pembiayaan sekolah adalah perencanaan pembiayaan dan penyelengaraan implementasi pelaksanaan pembiayaan, pengawasan dan pengendalian, dan pertanggung jawaban atau akuntabilitas. Berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil analisis data penelitian pada manajemen pembiayaan pendidikan pada SMK, menggambarkan hasil rata-rata sebesar 4,56 yang berada pada kategori sangat tinggi. Hal tersebut terukir dari skor rata-rata dimensi perencanaan pembiayaan dan penganggaran sebesar 4.57. Dimensi implementasi pelaksanaan pembiayaan sebesar 4,56. Dimensi pengawasan dan pengendalian sebesar 4,62, dan dimensi pertanggung jawaban/akuntabilitas sebesar 4,84.

Biaya dalam dunia pendidikan memiliki cadangan luas, yaitu setiap jenis pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentu uang maupun barang dan jasa. Pembiayaan pendidikan merupakan proses dalam merencanakan, memperoleh, mengalokasikan dan mengelola biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan proses pendidikan yang akan dan sedang dijalankan. Adapun yang menjadi sumber pembiayaan pendidikan pada lembaga pendidikan baik formal maupun non formal secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 sumber, yaitu yang berasal dari pemerintah dan orang tua/wali dan masyarakat (Abidin, 2017). Sehingga harus dikelola dengan baik agar mendapatkan hasil yang optimal.

Dalam bidang pendidikan, mutu meliputi input, proses, output dan outcome. Input pendidikan yang bermutu adalah segala sesuatu yang mampu diproses oleh sistem pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu dapat terlihat jika sistem pendidikan yang dilaksanakan mampu memberikan kontribusi yang aktif, kreatif dan memiliki makna bagi terciptanya tujuan pendidikan. Kualitas atau mutu dapat dicirikan sebagai garis bear dan pada umumnya atribut tenaga kerja dan produk yang menunjukkan kapasitasnya untuk memenuhi persyaratan yang diharapkan oleh klien. Dengan demikian, mutu pendidikan pada hakekatnya mencakup keseluruhan dari input, proses, dan output dalam kegiatan pendidikan. Untuk menghasilkan input, proses dan output pendidikan yang berkualitas harus dilakukan dengan administrasi yang baik dan benar sehingga berdampak pada produktivitas pelaksanaan program, serta peningkatan kualitas mutu pendidikan. Dengan demikian, kualitas pendidikan merupakan kapasitas lembaga dan sistem pendidikan untuk memajukan kualitas sesuai dengan cita-cita atau tujuan pendidikan melalui sistem pendidikan yang baik (Muqit, 2021).

Selain itu, faktor-faktor strategik yang mempengaruhi mutu pendidikan, yaitu kurikulum/proses belajar mengajar, manajemen sekolah, organisasi/ kelembagaan sekolah, fasilitas/ sarana prasarana, guru, pembiayaan, peserta didik, peran serta masyarakat, dan kultur sekolah. Mutu pendidikan dalam penelitian ini melihat kualitas pendidikan dari mutu siswa, mutu guru, lingkungan belajar, disiplin sekolah, kesediaan sumber belajar, partisipasi orang tua, satuan biaya. Mutu pendidikan dappat dikatakan ketika melihat berkembangnya potensi anak didik. Pendidikan dapat dikatakan bermutu jika para peserta didiknya dapat mengembangkan potensi dirinya maksimal (Emzir & Sam, 2010).

Pendidikan yang bermutu dapat diidentifikasi melalui ciri-ciri berikut (a) berfokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun ekstrernal, (b) berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang muncul, dengan komitmen untuk bekerja secara benar dari awal (c) memiliki investasi pada sumber daya manusianya, sehingga terhindar dari berbagai “kerusakan psikologis” yang sulit memperbaikinya, (d) memiliki strategi untuk mencapai kualitas, baik di tingkat pimpinan, tenaga

akademik, maupun tenaga administratif, (e) mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk mencapai kualitas dan memposisikan keslahan sebagai instrumen untuk berbuat benar pada masa berikutnya. (f) memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas, baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, (g) memiliki proses perbaikan dengan melibatkan semua orang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya, (h) mendorong orang dipandang memiliki kreativitas, mampu menciptakan kualitas dan merangsang yang lainnya agar dapat bekerja secara berkualitas.

Biaya dan mutu sekolah memiliki keterkaitan secara langsung. Biaya pendidikan memberikan pengaruh yang positif melalui faktor kepemimpinan dan manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan yang kompeten dalam meningkatkan pelayanan pendidikan melalui peningkatan mutu. Dalam menunjang peningkatan mutu sekolah SMK, manajemen pembiayaan pendidikan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan sehingga menunjang peningkatan mutu sekolah. Berdasarkan penelitian yang ada dengnan sumber pembiayaan dari dana BOS memiliki mutu sekolah yang kecenderungan nilai rata-ratanya sangat tinggi. Hal demikian membuktikan bahwa untuk menyelenggrakan pendidikan diperlukan peran serta pembiayaan pendidikan agar dapat bermutu.

Sekolah dengan sumber pendanaan dari pemerintah mengharuskan kepala sekolah untuk mampu menjalankan tugas manajerialnya dalam bidang keuangan. Manajemen pembiayaan mengupayakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi bagi setiap kegiatan pembelajaran dari sektor pembiayaan. Pemahaman terhadap tahapan manajemen pembiayaan diperlukan sekali karena dengan pengelolaan pembiayaan yang efektif dan efisien, setiap kegiatan pembelajaran mampu ditunjang keberhasilannya, sehingga mutu sekolah dapat adanya peningkatan. Karena kepala sekolah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi mutu pendidikan.

5. Conclusion

Peningkatan mutu pendidikan merupakan hal terpenting dan utama bagi sekolahan. Untuk terciptanya pendidikan bermutu dibutuhkan pembiayaan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Pembiayaan pendidikan harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuuk meningkatkan kredibilitas sekolah/madrasah, sebagai upaya peningkatan mutu dalam pendidikan. Biaya dan mutu sekolah memiliki keterkaitan secara langsung. Biaya pendidikan memberikan pengaruh yang positif melalui faktor kepemimpinan dan manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan yang kompeten dalam meningkatkan pelayanan pendidikan melalui peningkatan mutu.

Dalam menunjang peningkatan mutu sekolah di SMK, manajemen pembiayaan pendidikan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan sehingga menunjang peningkatan mutu sekolah. Pendidikan dapat dikatakan bermutu jika peserta didiknya dapat mengembangkan potensi dirinya secara maksimal.

References

Abidin, A. A. (2017). Manajemen pembiayaan pendidikan tinggi dalam upaya peningkatan mutu (Studi kasus pada perguruan tinggi swasta menengah di Surabaya). *Jurnal Penjaminan Mutu*, *3*(1), 87–99.

Emzir, C., & Sam, M. (2010). Isu-isu kritis kebijakan pendidikan era otonomi daerah. *(No Title)*.

George, M. W. (2020). *The Elements of Library Research*. UK: Princeton University.

Kurniady, D. A., Setiawati, L., & Nurlatifah, S. (2018). Manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah menengah kejuruan. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, *17*(3), 263–269.

Mafazi, R. T., & Ahmad, M. (2024a). Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Implikasinya dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan). *Jurnal Pendidikan Indonesia*, *5*(6).

Maruhawa, A. (2023). Educational Financing Management: Concepts, Implications and Quality Development. *At-Tafkir*, *16*(1), 55–68.

Muqit, A. (2021). Manajemen pembiayaan dalam peningkatan mutu pendidikan. *Journal Multicultural of Islamic Education*, *4*(2), 81–93.

Papilaya, J. (2022). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Cv. Azka Pustaka.

Sabban, I. (2022). *Model KASE2F Sebagai Strategi Perbaikan Mutu Pendidikan Tinggi*. Indonesia Emas Group.

Setyosari, H. P. (2016). *Metode penelitian pendidikan & pengembangan*. Prenada Media.

Solihin, M. (2019). Kepemimpinan dalam Perspektif Islam. *Jurnal MANAJERIAL*, *2*(2).

Wahyudin, U. R. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi Dan Akuntabilitas)*. Deepublish.